

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada pemaparan hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, maka mampu diambil berbagai simpulan, yakni:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan semakin tingginya tingkatan kemandirian keuangan daerah berdampak pada semakin besarnya kapabilitas pemerintah daerah perihal tindakannya mengelola sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
2. Rasio efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan negatif serta tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjelaskan tingkat efisiensi pengelolaan belanja daerah belum memiliki kemampuan dalam memberi pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi pengeluaran daerah belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas dan arah belanja yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.
3. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil ini menjelaskan peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan aspek kesehatan, pendidikan, serta standar hidup lebih baik mampu menaikkan produktivitas dari masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2 Saran

Pada pemaparan dari hasil penelitian, mampu disusun berbagai saran, yakni berupa:

1. Bagi pemerintah daerah, dapat terus meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan pengelolaan berbagai sumber pendapatan daerah dengan kontinu serta efektif. Dengan meningkatnya kemandirian fiskal, pemerintah daerah mempunyai lebih besarnya ruang guna menetapkan kebijakan pembangunan yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Dalam pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan ketepatan alokasi anggaran agar lebih difokuskan ke berbagai sektor produktif yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah sehingga memiliki kemampuan dalam berkontribusi dengan lebih besar pada pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah daerah juga dapat mengupayakan peningkatan mutu pembangunan manusia, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut penting dilakukan karena meningkatnya kualitas SDM ini terbukti mampu dalam memunculkan kenaikan produktivitas tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, saran berupa memunculkan variabel lainnya yang mampu memberi pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, seperti belanja modal, investasi, tingkat pengangguran, atau inflasi. Selain itu, penelitian lanjutan juga mampu memperluas periode penelitian ataupun memanfaatkan wilayah penelitian yang lebih luas agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

5.3 Implikasi Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini memberikan beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi daerah. Beberapa implikasi kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan kemandirian fiskal daerah dengan adanya optimalisasi PAD.

Temuan yang didapat penelitian ini menjelaskan perihal rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Atas dasar ini, otoritas pemerintah daerah memerlukan peningkatan kemandirian fiskal melalui upaya optimalisasi berbagai sumber PAD, seperti retribusi daerah, pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial di daerah guna memperluas basis penerimaan daerah. Dengan meningkatnya kemandirian fiskal, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas dan ketepatan alokasi belanja daerah.

Meskipun rasio efisiensi pada penelitian ini tidak menyajikan pengaruh yang signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan efektivitas dan mutu pengelolaan belanja daerah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui cara memprioritaskan alokasi anggaran ke berbagai sektor yang dampaknya besar pada aktivitas ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menaikkan transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah.

3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya kualitas SDM, diharapkan produktivitas masyarakat juga meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

